

# **KIPRAH POLITIK SUTAN SJHRIR DALAM PEMERINTAHAN (1945-1947)**

Oleh  
Ariffudin: 08406244035  
Udin\_Slamet@yahoo.com  
Pembimbing: Zulkarnain, M.Pd

## **ABSTRAK**

Pemerintahan Sutan Sjahrir antara tahun 1945-1947 menandai lahirnya era Parlemerter dalam sejarah tata negara di Indonesia. Transformasi sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlemerter dipandang sebagai jalan keluar dalam merespon aspirasi demokrasi dan sekaligus mencegah potensi totaliter dari rezim pemerintahan sebelumnya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima langkah, yakni, Pemilihan Topik, Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Bersandar pada hasil analisis melalui kajian literatur, penulis menarik kesimpulan bahwa: (1) Sutan Sjahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. (2) Sutan Sjahrir menjadi salah penggagas utama dari pergantian sistem pemerintahan Indonesia di masa awal kemerdekaan. Selain alasan ideologis, perubahan ini juga dilandasi oleh pertimbangan taktis. (3). Sutan Sjahrir tercatat tiga kali berturut-turut duduk sebagai Perdana Menteri. Tanggung jawab yang diembannya cukup berat, yakni menahkodai jalannya revolusi. Menghadapi gelagat Belanda yang hendak kembali menjajah, Sutan Sjahrir lebih mengedepankan jalan diplomasi, ketimbang konfrontasi. Lewat jalur diplomasi ini, Sutan Sjahrir setidaknya berhasil mencegah keterlibatan lebih jauh pihak Inggris dan bisa membawa masalah Indonesia untuk dibahas dalam forum tingkat dunia.

Kata Kunci: Sutan Sjahrir, Politik, Pemerintahan.

## ***Sutan Sjahrir's Political Participation In The Government (1945-1947)***

By  
Ariffudin: 08406244035  
Udin\_Slamet@yahoo.com  
Supervisor: Zulkarnain, M.P,d

## **ABSTRAK**

*Sutan Sjahrir's administration in the period of 1945-1947 marked the parliamentary era in the history of government in Indonesia. The transformation from the presidential system to the parliamentary system was viewed as a solution in response to democratic aspiration and simultaneously to prevent the totalitarian potential of the previous administration regime. This journal writing employed the historical method consisting of five steps, i.e. topic selection, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Based on the results of the analysis through a literature study, the conclusions were as follows. (1) Sutan Sjahrir was born on 5 March 1909 in Padang Panjang, West Sumatera. (2) He was one of the thinkers of the transformation of the Indonesian government system in the early independence era. Besides ideological reasons, the transformation was based on practical considerations. (3) He assumed the prime minister position in three consecutive periods. The responsibility that he carried out was heavy enough, namely navigating the path of revolution. Responding to the tendency of the Netherlands to reoccupy the country, Sutan Sjahrir preferred a diplomatic way to a confrontation one. Through a diplomatic way, he succeeded in preventing the further involvement of the United Kingdom and was able to make the problems of Indonesia discussed in the world level forum.*

Keywords: Sutan Sjahrir, Political, Government.

## A. Pendahuluan

Bererdarnya kabar penyerahan Jepang pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, telah menyulut semangat beberapa kelompok pemuda di Jakarta untuk mendesak Sukarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Semula keduanya menolak, dengan dalih belum percaya betul ikhwal kepastian menyerahnya Jepang. Tapi setelah berdebat panjang dan bersitegang, bahkan sampai diwarnai insiden “penculikan”, kedua pemimpin tersebut akhirnya bersedia membacakan proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Revolusi kemerdekaan dimulai dan mendapat sambutan luas dari masyarakat. Revolusi bahkan sanggup menjelma sebagai satu kesadaran kolektif yang mampu menjadi perekat dari pluralitas masyarakat. Pada prinsipnya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang, laiknya tuduhan yang acap dilayangkan Belanda, tapi merupakan buah dari jerih payah perjuangan bangsa Indonesia sendiri.<sup>1</sup>

Sebagai tindak lanjut, lantas pada 18 Agustus 1945 orang-orang yang berhimpun dalam PPKI (Panitia Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia) menggelar sidang perdananya. Melalui sidang tersebut lahirlah tiga keputusan penting berupa: mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya, dan pembentukan sebuah Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DRR (Dewan Perwakilan Rakyat). Sidang kemudian berlanjut keesokan harinya pada 19 Agustus 1945. Adapun putusan dari sidang tersebut ialah: Pembentukan 12 Departemen Pemerintahan, Pembagian wilayah Indonesia dalam 8 provinsi. Selanjutnya rapat PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 secara resmi membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang bertugas sebagai lembaga pembantu Presiden beserta susunan daftar anggotanya. Selain KNIP, PPKI juga membentuk Partai negara dengan nama Partai Nasional Indonesia dan pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat).<sup>2</sup>

Keputusan PPKI tersebut lantas menyulut rasa ketidakpuasan di beberapa kalangan, khususnya kalangan muda. Alasannya, selain susunan anggota KNIP mayoritas diisi oleh para “kolaborator” Jepang. Keputusan pembentukan partai tunggal dan pemberian kewenangan luar biasa pada presiden juga dikhawatirkan akan memangkas aspirasi demokrasi dan berpotensi membawa negara ke dalam totaliterianisme atau fasisme. Protes pun gencar dilancarkan, salah satu tokoh yang gencar melakukan itu adalah Sutan Sjahrir bersama barisannya. Sutan Sjahrir yang semasa penjajahan Jepang menggalang gerakan bawah tanah melihat bahwa KNIP dan PNI hanya sekedar kelanjutan dari lembaga bentukan Jepang, *Jawa Hokokai* yang notabene merupakan fusi golongan-golongan elit. Atas tuntutan ini maka pada akhir Agustus 1945 pembentukan partai negara ditanggihkan, sehingga hanya KNIP dan komite-komite nasional di tingkat daerahlah yang merupakan lembaga politik utama.<sup>3</sup>

Sementara itu suhu politik dalam negeri makin memanas, persis setelah serdadu Inggris berlabuh di teluk Jakarta, pada tanggal 29 Oktober. Tugas pasukan Inggris sangat berat, Intruksi Lord Mountbatten, panglima Sekutu untuk Asia Tenggara, tegas memerintahkan untuk memulihkan *status quo*, membebaskan tawanan perang dan melucuti serta memulangkan serdadu Jepang. Tugas pasukan Inggris makin kompleks ketika mereka tahu telah terjadi perubahan politik di Indonesia dan karenanya seperti dihadapkan pada tekad baja rakyatnya. Kedatangan serdadu Inggris lambat laun disambut dengan rasa curiga bercampur waspada, lebih-lebih kabar yang beredar menyebutkan bahwa kedatangan mereka diboncengi dan bermaksud menegakan kembali kekuasaan Belanda.<sup>4</sup> Kedatangan serdadu sekutu juga

---

<sup>1</sup> Bend Anderson “*Saat yang Menentukan*” dalam “*Gelora Api Revolusi*”, Jakarta: Gramedia, 1988, hlm. 100-101. Peny; Peter Carey dan Colin Wild.

<sup>2</sup> Zulkarnain, *Jalan Meneguhkan Negara*. Yogyakarta: Pujangga Press, 2012, hlm. 91-95.

<sup>3</sup> M.C. Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 319-320.

<sup>4</sup> George M.C Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 1995, hlm. 178

menyisakan tanda tanya besar ikhwal nasib pemerintahan yang rata-rata diisi oleh orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Jepang. Lebih-lebih Belanda mulai gencar melakukan propaganda bahwa Indonesia tidak lebih dari boneka Jepang dan Sukarno-Hatta adalah kolaborator fasis yang layak ditangkap sebagai penjahat perang. Eksistensi republik jelas tengah diuji dihadapan propaganda sporadis Belanda, dan sebetulnya itu hanya sekedar siasat Belanda agar sekutu untuk mau membantu mereka menegakan kembali supermasi kekuasaannya. Keadaan ini jelas menyulitkan kedudukan republik dihadapan sekutu selaku pemenang perang dunia II.<sup>5</sup>

Selama berlangsungnya revolusi fisik antara 1945-1949, para pemimpin politik beserta rakyat Indonesia boleh dibilang bahu membahu bersama dalam mempertahankan kemerdekaan dihadapan ancaman Belanda yang bergelagat hendak menjajah kembali. Salah satu tokoh yang juga turut berjuang mempertahankan kemerdekaan adalah Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir dikenal lantaran sewaktu memimpin KNIP, ia berperan dalam membidani keluarnya Maklumat Pemerintah nomor X tertanggal 16 Oktober yang berisi tentang instruksi pembentukan partai-partai dan pembentukan BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat)<sup>6</sup> sebagai pengganti MPR telah mengikis habis kewenangan luarbiasa Presiden. Sutan Sjahrir lantas disebut sebagai arsitek dari pergeseran sistem dari presidensial ke parlementer pada paruh November 1945. Suatu pergeseran yang dicapai bukan melalui perubahan UUD, melainkan dengan diterimanya konvensi yang menyatakan bahwa UUD akan berjalan di dalam sistem parlementer.<sup>7</sup>

Peralihan sistem ini ternyata berpengaruh kuat terhadap kedudukan politik Sutan Sjahrir, puncaknya adalah ketika ia di percaya untuk menduduki kursi Perdana Menteri, sebuah kedudukan yang akan memainkan peranan vital dalam menentukan nasib Republik. Kendati banyak pihak ragu padanya, tapi berkat sokongan penuh Sukarno-Hatta, legitimasi pemerintahan baru ini segera mendapat pengakuan luas. Penunjukan Sutan Sjahrir dinilai tepat, selain karena kemahirannya dalam berdiplomasi, ia juga dianggap punya koneksi partai sosialis Belanda. Selain itu rekam jejaknya yang bebas dari fasisme Jepang juga dianggap dapat menepis kecurigaan pihak Sekutu.<sup>8</sup> Semasa menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1945-1947, Sutan Sjahrir tidak saja dihadapkan pada tugas berat berupa mempertahankan kemerdekaan, tapi juga dituntut untuk dapat mengkonsolidasikan pemerintahan yang rata-rata diisi oleh orang yang minim pengalaman, lengkap dengan segala keterbatasan fasilitas. Kendati menuai polemic, Sutan Sjahrir lebih memilih jalan diplomasi, ketimbang konfrontasi. <sup>9</sup>

Agaknya perlu juga di sertakan disini mengenai penilaian sebagian orang atas naiknya Sutan Sjahrir di teras kekuasaan republik, B.M. Diah misalnya mensinyalir bahwa manuver politik yang dilakukan Sutan Sjahrir dan kawan-kawan tak ubahnya sebagai sebuah *The silent coup*. Sedang Y.B. Mangunwijaya melihat bahwa tindakan Sutan Sjahrir merupakan sebuah keharusan, sebab untuk menghadapi Sekutu dibutuhkan tokoh yang bebas dari kerjasama Jepang. Orang boleh setuju dan tidak setuju, tapi sejarah memperlihatkan bahwa begitu Sutan Sjahrir menjadi ketua Badan Pekerja Komite Nasional, lahirlah Maklumat nomor X yang memungkinkan lahirnya partai-partai politik dan mengikis habis kekuasaan luar biasa Sukarno.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm182-183.

<sup>6</sup> Badan Pekerja KNIP dibentuk dengan tujuan untuk menggantikan fungsi MPR yang dirangkap presiden, dalam praktiknya BP KNIP yang mulai aktif 1 November 1945 memainkan peran sebagai parlemen. J.D. Legge, *“Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Sutan Sjahrir”*, Jakarta: Grafiti,1993, hlm. 180.

<sup>7</sup> Zulkarnain, *op.cit.*, hlm, 67.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>9</sup> Arif Zulkifli, dkk, *Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta: KPG, 2010, hlm, 76.

<sup>10</sup> *Loc.cit.*, hlm, 67-72.

## B. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima langkah. 1. Pemilihan Topik, yakni kegiatan awal dari penelitian guna menentukan tema yang hendak diangkat. 2. Heuristik, yakni iktiar untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang paralel dengan tema hendak diulas. 3. Kritik Sumber, tahap ini berkenaan dengan proses kritis guna menilai kesahihan data. 4. Interpretasi, yakni iktiar untuk menemukan makna yang saling beririsan dari sumber-sumber sejarah. 5. Historiografi, merupakan proses untuk menyusun sumber-sumber sejarah yang telah dianalisis menjadi sebuah teks berupa karya sejarah.

## C. Pembahasan

### 1. Latar Belakang Kehidupan.

Sutan Sjahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909, dari pasangan Siti Rabiah dan Muhamad Rasad. Jamak diketahui bahwa dasawarsa awal abad ke-20, Hindia-Belanda tengah mengalamai fase modernisasi sebagai imbas dari politik etis, dengan salah satu program pokoknya berupa penyelenggaraan pendidikan Barat di tanah jajahan. Pada usia enam tahun Sutan Sjahrir bersekolah di *Eurpessche Lagere School* (ELS), dan baru lulus pada 1920. Setelah itu ia melanjutkan studinya di *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs* (MULO) baru selesai pada 1926.<sup>11</sup> Sutan Sjahrir lantas melanjutkan sekolahnya ke *Algemene Middlebare School* (AMS), di kota Bandung, dengan jurusan Barat Klasik. Iklim intelektual dan pergerakan yang massif di kota Bandung inilah, yang pada gilirannya membuka kesadaran politik Sutan Sjahrir atas penjajahan.<sup>12</sup> Selepas lulus dari AMS, pada 1929 Sutan Sjahrir lantas melanjutkan studinya di Universitas Amsterdam, Belanda menekuni jurusan ilmu hukum. Di Belanda ia juga turut aktif di Perhimpunan Indonesia.<sup>13</sup>

Kelahiran sosialisme pada paruh abad ke-19 merupakan suntikan segar pada gerakan pembebasan di pelbagai belahan dunia, termasuk pada Sutan Sjahrir muda. Sebuah gagasan tidak lahir dari dalam ruang hampa, arti-nya ia memiliki kebertautan dengan kontes situasi dan kondisi sebuah masyarakat serta *Zeitgeist* (Baca: Semangat Zaman) yang melingkupinya. Sutan Sjahrir adalah seorang sosialis dan mengenai pilihannya ini ia menuturkan: “*Setiap orang Asia yang terpelajar, yang hidup di negeri terbelakang, dan mendambakan suatu kemungkinan supaya negerinya beroleh persamaan yang nyata dengan barat yang kaya dan modern, pada dasarnya akan berpikir secara sosialis*”.<sup>14</sup> Kendati menganut sosialisme, Sutan Sjahrir sendiri menolak tendensi totalitarianisme sebagaimana yang terlihat pada konsepsi Karl Marx tentang diktator proletariat.<sup>15</sup> Baginya, tendensi ini bukan hanya bias, tapi juga mengingkari cita-cita paripurna sosialisme sendiri, yang hendak menegakan sebuah masyarakat manusia yang bebas, setara dan adil. Sutan Sjahrir sendiri lantas menyebut gagasannya sebagai sosialisme-kerakyatan. Lebih lanjut, Sutan Sjahrir mendedahkan gagasannya tentang sosialisme sebagai berikut: “*Menurut jalan pikiran ini sosialisme hendaknya dipahami, sebagaimana yang dicita-citakan, merupakan tingkatan dalam perkembangan masyarakat dimana telah diwujudkan keamanan pribadi sebesar-besarnya, keadilan sosial dan kesempatan yang sama buat setiap orang untuk hidup dan untuk berkembang*”.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Rudolf Mrazek, *Sutan Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta: YOI, 1996, hlm. 40.

<sup>12</sup> Arif Zulkifli, dkk, *op.,cit.* hlm. 23.

<sup>13</sup> Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 37.

<sup>14</sup> Sutan Sjahrir, *Sosialisme, Indonesia, Pembangunan*, Jakarta, Leppenas, 1982, hlm, 27.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 80-85.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm, 14.

## 2. Sebagai Ketua KNIP

Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi babak awal dari revolusi kemerdekaan Indonesia. Jamak diketahui bahwa di masa awal kemerdekaan Sutan Sjahrir tidak bersedia masuk ke dalam pemerintahan, padahal tawaran itu berulang kali dilayangkan padanya, baik melalui Sukarno ataupun Hatta. Alasan mengenai sikapnya ini setidaknya-tidaknya dapat dikerucutkan pada tiga hal: *pertama*, Sutan Sjahrir menghendaki sebuah deklarasi kemerdekaan yang anti fasis, *kedua* Sutan Sjahrir memandang bahwa deklarasi kemerdekaan tidak perlu seizing Jepang, sebaliknya malah sebagai isyarat perlawanan terbuka terhadap Jepang, dan *ketiga*, Sutan Sjahrir kecewa dengan kepemimpinan revolusi yang menurutnya didominasi oleh orang-orang yang “terbiasa membungkuk serta berlari untuk Jepang atau Belanda”.<sup>17</sup> Sutan Sjahrir bersama sejumlah pengikutnya lantas berkeliling Jawa guna memantau jalannya revolusi serta mengetahui ikhwal kepastian sikap rakyat, yang ternyata begitu kuat mendukung kepemimpinan nasional Sukarno-Hatta. Kesan yang diperoleh Sutan Sjahrir sepulang dari perjalanan lantas mendorongnya guna menimbang kembali tawaran yang sempat dilayangkan Sukarno dan Hatta. Keputusan diambil, terhitung sejak 14 Oktober 1945, Sutan Sjahrir secara resmi bergabung sebagai anggota KNIP dan saat itu juga langsung ditunjuk sebagai ketuanya.<sup>18</sup>

Selama berkiprah di KNIP, ada empat perubahan penting digariskan dalam hubungannya dengan dinamika politik masa itu; *pertama*, penguatan kedudukan KNIP dari yang semula hanya sebagai lembaga penasihat presiden menjadi lembaga yang memiliki kewenangan legislatif, *kedua*,<sup>19</sup> mendorong agar tugas keseharian KNIP didelegasikan ke sebuah komite kecil bernama Badan Pekerja KNIP, *ketiga*, mendorong pembentukan partai-partai politik,<sup>20</sup> dan *keempat*, mendorong adanya transformasi sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer.<sup>21</sup> Penting untuk diingat, perubahan-perubahan tersebut selain dilandasi oleh pertimbangan ideologis berupa mendorong terciptanya iklim demokratis, juga didorong oleh pertimbangan taktis, yakni menunjukkan pada Sekutu bahwa Indonesia bukanlah negara bentukan Jepang, sebagaimana yang acap dituduhkan oleh Belanda.<sup>22</sup> Pada 14 November 1945, Sutan Sjahrir kemudian secara resmi menjabat sebagai Perdana Menteri.

## 3. Sebagai Perdana Menteri

### • Kabinet Sutan Sjahrir I

Revolusi Indonesia yang dimulai persis setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sesungguhnya memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap golongan masyarakat. Bagi para pemimpin Republik, revolusi lebih dimaknai sebagai soal-soal rasional, ketimbang melulu emosional. Sebagai salah satu eksponen revolusi, Sutan Sjahrir sadar betul bahwa segi krusial dari kepemimpinan revolusioner bukan semata-mata soal bagaimana menyuntikan kehendak, tapi lebih sebagai upaya mencari dan menunjukkan jalan pada rakyat berdasarkan perhitungan-perhitungan rasional.<sup>23</sup> Sutan Sjahrir resmi dilantik sebagai Perdana Menteri pada tanggal 14 November 1945, sewaktu usianya baru menginjak 36 tahun. Berbeda dengan susunan kabinet sebelumnya, kabinet Sutan Sjahrir terdiri dari orang-orang yang dianggap tidak memiliki rekam jejak dengan Jepang. Hanya ada dua

---

<sup>17</sup> Arif Zulkifli, dkk, *op.,cit.* hlm. 60.

<sup>18</sup> Rudolf Mrazek, *op.,cit.* hlm. 485.

<sup>19</sup> J.D. Legge, *op.,cit.* hlm. 180.

<sup>20</sup> George MC Kahin, *op.,cit.* hlm. 192.

<sup>21</sup> Zulkarnain, *op.,cit.* hlm. 67

<sup>22</sup> Arif Zulkifli, dkk, *op.,cit.* hlm. 69.

<sup>23</sup> Shoe Hoek Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*, Yogyakarta: Bentang, 2005, hlm, 129-130.

anggota kabinet lama yang tetap duduk, yakni Amir Sjariffudin yang memangku jabatan Menteri Pertahanan, dan Menteri Penerangan, serta Ir. Surachman, yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan.<sup>24</sup>

Menahkodai jalannya pemerintahan tentu bukan perkara mudah bagi Sutan Sjahrir, sebab selain belum berpengalaman, tanggung jawab yang diembannya jelas bukan main-main, yakni mempertahankan kemerdekaan ditengah-tengah ketegangan, ketidakjelasan dan kobaran asap pertempuran. Insiden demi insiden yang terjadi di masa-masa awal revolusi, seperti kekacauan dan meletusnya pelbagai pertempuran merisaukan hati Sutan Sjahrir, dan kini sebagai Perdana Menteri ia menghendaki agar ketertiban dapat segera dipulihkan. Sutan Sjahrir memandang dengan pulihnya ketertiban, maka serangkaian tuduhan Belanda bahwa Indonesia hanyalah gerombolan pengacau, pembunuh dan perampok dapat ditangkis. Apa yang diikhtiarkan Sutan Sjahrir tidak mudah, lebih-lebih sentimen anti-asing yang telah berakar kuat sejak kolonialisme Belanda dan Jepang<sup>25</sup>

Menjamurnya laskar-laskar bersenjata yang terbentuk secara sporadis juga meninggalkan persoalan tersendiri. Memang betul bahwa kehadiran laskar-laskar tersebut merupakan wujud dari respon kebangsaan, tapi masalahnya adalah bagaimana mengontrolnya.<sup>26</sup> Maka dari itulah kebutuhan atas bentuk angkatan perang yang solid dan terorganisir dengan garis komando yang ketat menjadi satu keniscayaan. Melalui koleganya, Amir Sjarifudin yang kala itu menjabat sebagai menteri pertahanan dan penerangan diupayakanlah penyusunan angkatan perang modern. TKR resmi menyandang sebagai angkatan perang republik, dengan Soedirman sebagai panglima besar.<sup>27</sup>

Sutan Sjahrir meyakini bahwa soal kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari persoalan global. Hancurnya Jepang sebagai raksasa Pasifik akibat PD II, serta tampilnya pihak sekutu sebagai pemenang perang, dan mulai munculnya gejala polarisasi dunia perlu mendapat perhatian lebih. Apa yang dikhawatirkan Sutan Sjahrir adalah manakala Inggris dan Amerika terseret lebih jauh ke dalam konflik antara Indonesia dan Belanda. Pandangannya ini dibangun atas dasar asumsi ikhwal kedudukan Indonesia yang berada ditengah-tengah kepungan modal *Anglo-Saxon*, Inggris dan Amerika. Karena itu lantas Sutan Sjahrir memandang bahwa Indonesia sebisa mungkin tidak mengambil sikap permusuhan dengan keduanya.<sup>28</sup>

Ikhtiar Sutan Sjahrir guna menyelesaikan sengketa dengan Belanda lewat meja perundingan, membuatnya tidak populis dimata sebaian besar pihak. Ia menuai kritik dan hujatan dari pihak-pihak yang menghendaki konfrontasi. Perundingan pertama digelar pada tanggal 17 November 1945 dan menghasilkan rekomendasi dari pihak Belanda yang intinya berupa soal-soal keamanan di Indonesia. Akan tetapi perundingan ini tidak kuncung menemukan kata sepakat, selain Sutan Sjahrir belum sempat memberi jawaban atas usulan karena kabinetnya tengah sibuk mengadakan rapat bersama KNIP. Perundingan selanjutnya digelar pada 10 Februari 1946, yang melakirkan butir-butir pernyataan politik pemerintah Belanda, bahwa Indonesia nantinya akan dijadikan sebagai negara persemakmuran di bawah Kerajaan Belanda. Belum sempat menjawab, perundingan ini menuai reaksi keras dari dari pelbagai pihak di Indonesia.<sup>29</sup>

Sebuah rapat akbar digelar di Purwokerto, pada tanggal 4-5 Januari 1946. Rapat ini dihadiri lebih dari 300 delegasi organisasi politik dan militer. Tan Malaka muncul sebagai singa podium dengan menggagas berdirinya Persatuan Perjuangan dan berseru akan perlunya solidaritas nasional dan monolitik selama revolusi. Persatuan Perjuangan segera menjadi menjadi kekuatan raksasa dan selama

---

<sup>24</sup> George M.C Kahin, *op.cit.*, hlm, 213.

<sup>25</sup> Arif Zulkifli dkk, *op.,cit*, hlm, 75.

<sup>26</sup> J.D. Legge, *op.,cit*, hlm. 189.

<sup>27</sup> Subadio Sastroatomo, *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 200-201.

<sup>28</sup> J.D. Legge, *op.,cit*, hlm.192.

<sup>29</sup> I.A.A.G. Agung, *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara-Sebelas Maret University Press, 1995, hlm. 40-41.

sebulan bahkan berhasil merangkul 141 Organisasi.<sup>30</sup> Menguatnya pamor Persatuan Perjuangan di satu sisi justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di dalam pemerintahan. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah Sutan Sjahrir makin menghebat sehubungan dengan terus tersudutnya kedudukan republik. Sutan Sjahrir mengajukan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Februari dan baru disetujui oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Februari 1946.<sup>31</sup>

#### • Kabinet Sutan Sjahrir II

Jatuhnya kabinet Sutan Sjahrir tidak serta merta membuat kelompok Tan Malaka dapat melenggang mulus menduduki kekuasaan. Sampai seminggu lamanya, Persatuan Perjuangan tidak kunjung menemukan kata sepakat. Karena itu Sukarno lantas meminta Sutan Sjahrir guna membentuk kabinet baru. KNIP yang saat itu kebetulan masih berada dalam masa-masa sidang kemudian mendukung usulan ini, tapi dengan syarat keanggotaan kabinet diperluas sehingga dapat lebih mewakili aliran-aliran politik utama di dalam negeri. Sutan Sjahrir sendiri tidak keberatan, asalkan dengan catatan bahwa ia tetap mendapat keleluasaan penuh dalam memilih anggota-anggota kabinetnya. Maka pada tanggal 3 Maret 1946 selesailah pembentukan kabinet baru tersebut.

Sementara itu oposisi di dalam negeri sedikit mengendur selepas ditangkapnya para eksponen Persatuan Perjuangan, seperti Tan Malaka dan Chairul Saleh. Namun kemudian Pemerintah Sutan Sjahrir kembali dipusingkan ketika pada awal tahun 1946 sebagian wilayah Sumatra dilanda oleh apa yang dikenal sebagai gelombang revolusi sosial. Harapan-harapan yang menggunung terhadap revolusi kemerdekaan ternyata tidak selaras dengan kenyataan di lapangan. Para bangsawan yang dulu turut menjadi kaki tangan di era kolonial, ternyata masih duduk di singgasana kekuasaan mereka. Banyak bangsawan yang dihabisi dan istana mereka dirobohkan.

Pemerintah pusat di Jawa segera bertindak cepat, sebuah misi yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin dikirim ke Sumatra. Delegasi pemerintah segera menemui Tengku Hasan, selaku Gubernur Sumater. Berkat kerja keras dalam merangkul pelbagai pihak, baik sipil maupun militer, pelan-pelan kendali atas wilayah tersebut, kendati tidak mutlak berhasil ditegakkan kembali. Amir Sjariffuidn juga mengemban misi untuk mengorganisir suatu KNI Sumatra, dan misi tersebut relatif berhasil dengan digelarnya sebuah rapat KNI pertama di Bukit Tinggi pada 15 April 1946, yang dihadiri lebih dari 100 wakil delegasi dari seluruh bagian Sumatra.<sup>32</sup>

Pada bulan April 1946, Pemerintahan Sutan Sjahrir menggejutkan banyak kalangan ketika ia menawarkan bantuan beras berjumlah 500.000 ton terhadap India yang tengah dilanda kelaparan hebat. Sutan Sjahrir meminta agar beras tersebut ditukar dengan tekstil dan obat-obatan. Beberapa pemimpin Republik terhenyak dan memprotes kala itu, lebih-lebih kondisi Republik sendiri masih belum kuat. "Kenekatan" Sutan Sjahrir dilandasi oleh asumsi bahwa terdapat surplus atas hasil panen tahun itu. Jawaharlal Nehru yang menjadi pemimpin India kala itu menyambut positif uluran bantuan Sutan Sjahrir, pihak Inggris juga member respon positif atas langkah ini.<sup>33</sup>

Kendati menuai kecaman pelbagai pihak, Sutan Sjahrir tetap pada pendiriannya untuk kembali menyambung jalan diplomasi yang sempat dirintis dulu. Sebuah perundingan digelar di Hoge Valuwe, Belanda pada 14-16 April 1946. Dalam perjanjian ini pihak Republik mengajukan tiga usul, yakni: *Pertama* Pengakuan atas Republik Indonesia sebagai pengemban kekuasaan di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, *kedua* pengakuan *de facto* atas Sumatra, Jawa dan Madura, dan *ketiga* Kerja sama atas landasan persamaan derajat antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini menemui jalan buntu lantaran Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan *de facto* kedaulatan RI atas Jawa dan

---

<sup>30</sup> George M.C Kahin, *op.cit.*, hlm. 217-220.

<sup>31</sup> Moedjanto, *Indonesia Abad 20*, Jakarta: Kanisius, 1988, hlm. 153.

<sup>32</sup> George M.C Kahin, *op.cit.*, hlm 224-2230.

<sup>33</sup> Arif Zulkifli dkk, *op.,cit*, hlm. 80-82.

Madura saja, dan itupun masih harus dikurangi oleh daerah-daerah yang dikuasai oleh pasukan Sekutu.<sup>34</sup>

Gubernur Van Mook lantas kembali membawa usulan Pemerintah Belanda pada tanggal 2 Mei 1946. Usulan tersebut berisi kesediaan Belanda untuk mengakui Republik Indonesia dengan syarat berbentuk Serikat, serta tetap menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Selain itu, Pemerintah Belanda bersedia mengakui secara *de facto* kekuasaan Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera, dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belanda. Kali ini Sutan Sjahrir menolak usulan tersebut, karena dianggap tidak mengandung sesuatu yang baru.<sup>35</sup> Belanda memang tampak tidak mempunyai itikad serius guna menyelesaikan persoalan di meja perundingan, buktinya Belanda justru makin menunjukkan gelagat melakukan Politik Pecah Belah (*Divide et Impera*) terhadap eksistensi Republik, seperti dengan menggelar Konverensi Malino pada 15 Juni 1946.

Kendati pucuk pimpinan Persatuan Perjuangan masih meringkuk dipenjara, Oposisi terhadap pemerintahan Sutan Sjahrir sendiri masuk cukup kuat dan seperti menemui klimaksnya ketika pada 27 Juni, ia bersama rombongan yang baru saju pulang dari Banyuwangi singgah di Solo lantas diculik oleh sejumlah tentara atas perintah Mayjend Sudarsono. Kabar penculikan Sutan Sjahrir akhirnya sampai di telinga Amir Sjarifudin, yang langsung menggelar rapat dan mengusulkan agar selama keadaan genting itu kekuasaan berada dibawah kendali penuh Presiden Sukarno. KNIP menyetujui usul ini, dengan syarat selama keadaan masih genting. Penculikan Sutan Sjahrir juga menuai reaksi keras dari Pesindo dan Divisi Siliwangi, bahkan keduanya mengancam akan mengerahkan kekuatan penuh untuk menggempur Surakarta jika Sutan Sjahrir tidak segera dibebaskan.<sup>36</sup>

Sukarno kemudian meminta Sudirman untuk melakukan tindakan tegas dengan menangkap para pemimpin Persatuan Perjuangan yang telah jelas-jelas hendak menunjukkan perebutan kekuasaan. Sutan Sjahrir kemudian berhasil dibebaskan, sehingga ancaman perang saudara dapat dicegah. Sadar bahwa peristiwa tersebut merupakan buntut dari kurang representatifnya pemerintahan. Maka Sukarno kemudian menggulirkan satu wacana ikhwal perlunya pembentukan pemerintahan yang jauh lebih representatif, dalam arti dapat lebih mencerminkan aspirasi dari beragam kalangan. Menjelang pertengahan Agustus 1946, KNIP dalam sidangnya kemudian mengemukakan bahwa situasi genting sudah berahir. Sidang tersebut juga melahirkan putusan atas perlunya perubahan komposisi dan meluasnya koalisi dalam pemerintahan. Sutan Sjahrir sendiri tidak bisa berbuat banyak, selain menerima keputusan tersebut.<sup>37</sup>

### • Kabinet Sutan Sjahrir III

Sewaktu kabinet ini diumumkan pada khalayak di tanggal 2 Oktober, jelaslah bahwa kabinet baru ini merupakan yang paling luas, dalam arti kadar keterwakilan politik sepanjang sejarah berdirinya Republik. Tengok saja, keterwakilan tidak saja ditujukan dengan duduknya sejumlah pembesar Masyumi dan PNI, tapi juga dapat terlihat dari duduknya sejumlah tokoh dari kelompok minoritas Cina dan Arab. Kali ini dan untuk kesekian kalinya Sutan Sjahrir masih tetap melangkah mantap untuk mengakhiri sengketa dengan Belanda melalui meja perundingan. Sebuah garis politik yang tidak mudah, selain harus berhadapan dengan kepiawaian politik “dua kaki” Belanda, Sutan Sjahrir juga mesti bersiap-siap menuai kritikan dari pihak-pihak yang berseberangan.

Sebetulnya sebelum diumumkan kabinet baru pada khalayak, pada 29 September di Jakarta, Sutan Sjahrir sudah melangsungkan pertemuan dengan delegasi Inggris dan Belanda. Atas prakaraka

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

<sup>35</sup> Nugroho Notosusanto & M.D Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 127.

<sup>36</sup> George M.C Kahin, *op.,cit*, hlm. 238-240.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 244.

diplomata Inggris, Lord Killearn, pertemuan lantas digelar kembali pada keesokan harinya. Pembicaraan kemudian berlanjut pada 7 Oktober, bertempat di rumah Konsul Jenderal Inggris. Tim delegasi Indonesia yang dipimpin Sutan Sjahrir bertemu dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Schermerhoon dan Van Mook. Arti penting dari pertemuan tersebut adalah dijajaknya sebuah kesepakatan guna membentuk sebuah panitia bernama *Truce-Committe* yang bertugas menghentikan permusuhan. Tanggal 14 Oktober kedua belah pihak, pada akhirnya bersedia mengadakan suatu gencatan senjata atau penghentian tembak menembak.<sup>38</sup>

Pasca gencatan senjata, delegasi Indonesia dan Belanda silih berganti bertemu. Hampir di setiap pembicaraan politik yang dilangsungkan berjalan secara alot, lantaran kedua belah pihak mengusung agenda yang sama sekali berbeda. Total keseluruhan kedua belah pihak telah melangsungkan pertemuan sebanyak sebelas kali. Dalam pertemuan keempat ditanggal 4 November, Belanda menyodorkan suatu rancangan perjanjian berjumlah 17 pasal yang nanti bakal dibahas lebih lanjut di dalam satu perundingan di Linggarjati. Inti dari rancangan ini adalah usulan pembentukan negara Federal, termasuk status Indonesia sebagai bagian didalamnya. Sutan Sjahrir sendiri keberatan dengan usulan ini.

Linggarjati pada tanggal 11-14 November 1945, menjadi saksi dari digelarnya sebuah perundingan penting yang bakal menentukan nasib Republik ke depan. Sutan Sjahrir memimpin tim delegasi Indonesia dengan anggota Mohamad Roem, Soesanto Tirtoprodjo dan Soedarsono. Sukarno dan Hatta juga turut hadir dalam perundingan. Pihak Belanda diwakili oleh Schermerhoon, Van Der Poll, De Boer dan Van Mook. Sedang pihak Inggris mengutus Lord Killearn sebagai penengah. Pada malam di hari kedua perundingan, delegasi Belanda menemui Sukarno dan Hatta dengan tanpa didampingi Sutan Sjahrir yang tengah kelelahan. Keesokan harinya Sutan Sjahrir terkejut, ketika mendengar bahwa Sukarno dan Hatta memutuskan untuk menerima begitu saja usulan Belanda tanpa sepersetujuan dirinya. Namun demikian, sebelum disetujui, Sutan Sjahrir berhasil memasukan pasal tambahan ikhwal arbitrase. Sehingga kedepannya, jika ada sengketa yang menyangkut perjanjian tersebut, soal tersebut dapat diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>39</sup>

Naskah perundingan Linggarjati yang memuat 17 pasal ketentuan tersebut kemudian di paraf di Jakarta pada 15 November. Pokok-pokok dari perundingan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda bersedia mengakui kekuasaan Indonesia secara de facto atas Sumatra, Jawa dan Madura.
2. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia akan bekerjasama untuk membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) atas seluruh wilayah eks Hindia Belanda sebagai negara berdaulat.
3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda, dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinya dan paling lambat terbentuk sebelum 1 Januari 1949.
4. Pemerintah Indonesia mengakui, memulihkan dan melindungi hak milik orang asing.
5. Pengurangan tentara antara kedua belah pihak dan kerjasama dalam hal ketentaraan.
6. Jika terjadi perselisihan yang menyangkut persetujuan ini, maka akan diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>40</sup>

Setelah naskah perundingan di paraf, kedua delegasi masih harus membawa hasil tersebut masing-masing parlemen untuk disahkan. Kendati Pemerintahan Sutan Sjahrir telah berulang kali mengutarakan bahwa persetujuan tersebut hanya bersifat sementara, namun ia tetap saja menuai badai kritik dari penentangannya macam Masyumi, PNI dan pengikut Tan Malaka. Sukarno-Hatta sepertinya tidak menghendaki kondisi ini berlarut-larut, setelah keduanya turun tangan untuk meyakinkan dan bahkan

---

<sup>38</sup> P. Sanders, "*Sutan Sjahrir dan Perjanjian Linggarjati*", dalam Rosihan Anwar (ed), *Mengenang Sutan Sjahrir*, Jakarta: Gramedia, 1980, hlm. 273-274.

<sup>39</sup> Arif Zulkifli, dkk, *op.cit*, hlm. 92.

<sup>40</sup> George M.C Kahin, *op.cit*, hlm. 247-248.

sampai mengancam bakal mundur sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Maka dalam sebuah rapat yang berlangsung di Malang pada 25 Maret, KNIP akhirnya menyetujui hasil perundingan Linggarjati.

Sementara itu pada 18 November 1946 dalam sebuah sidang di Kairo, Liga Arab menganjurkan agar semua negara Arab berkenan mengakui Indonesia, baik secara *de facto* maupun *de jure*. Sebuah utusan khusus kemudian mendarat di Yogyakarta, dengan mengemban amanat dari Liga Arab. Suatu delegasi Indonesia yang dipimpin Haji Agus Salim terbang ke Kairo, guna mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Mesir. Hasilnya Mesir bersedia mengakui Indonesia secara *de facto* dan *de jure*, dan sebagai tindak lanjut ditandatangani sebuah perjanjian persahabatan antara kedua negara di tanggal 10 Juni 1947. Pasca pengakuan Mesir, secara beruntun sejumlah negara Arab lantas mengakui kedaulatan Indonesia, seperti Lebanon, Suriah, Irak, dan Arab Saudi.<sup>41</sup>

Penting diingat bahwa hengkangnya Inggris telah membuat Belanda tidak punya pilihan lain, selain harus menambah kekuatan pasukannya. Tercatat hingga awal tahun 1947 serdadu Belanda ditaksir berjumlah lebih dari 120.000 orang, baik dari unsur kerajaan Belanda maupun KNIL.<sup>42</sup> Dugaan bahwa Belanda hendak membombardir Indonesia secara besar-besaran makin menguat ketika pada 27 Mei 1947, ketika Van Mook menyampaikan tuntutan berupa seruan agar pemerintah Republik untuk mengakui kedaulatan Belanda secara *de jure* hingga tanggal 1 Januari dan sebelum tanggal tersebut maka Indonesia akan diperintah oleh pemerintah darurat yang dikuasai Belanda. Van Mook kemudian mengultimatum bahwa penolakan atas tuntutan ini sama halnya dengan pernyataan perang. Sutan Sjahrir awalnya menolak tuntutan ini, namun setelah menimbang-nimbang bahwa ancaman Belanda kali ini tidak main-main, membuatnya melunak. Dalam surat balasan tertanggal 20 Juni Sutan Sjahrir akhirnya menyetujui tuntutan ini.<sup>43</sup>

Sikap Sutan Sjahrir kali ini kembali membuatnya berurusan dengan lawan-lawan politiknya. Sutan Sjahrir dianggap keterlaluan lantaran terlalu memberi konsesi pada Belanda, tuduhan sebagai penjual negara juga berulang kali mendarat di telinganya. Hampir semua partai besar, kecuali Masyumi menarik dukungan pada Sutan Sjahrir. Bahkan sikap Partai Sosialis sendiri kali ini juga retak, lantaran sebagian anggotanya menolak konsesi ini. Krisis kabinet Sutan Sjahrir makin menguat ketika Masyumi juga ikut menarik dukungannya. Sadar sudah kehilangan dukungannya, maka pada tanggal 27 Juni Sutan Sjahrir mengajukan pengunduran dirinya pada Sukarno.<sup>44</sup>

#### D. Kesimpulan

Bersandar pada hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama berkiprah di dunia politik Indonesia, nama Sutan Sjahrir akrab dikenang sebagai tokoh yang identik dengan gagasan demokrasi dan sosialisme.
2. Sukar dipungkiri bahwa peralihan sistem pemerintahan dari sistem Presidensial ke Parelenter di satu sisi, dan disusul dengan naiknya Sutan Sjahrir disisi lain, telah sedikit banyak mengubah citra Republik dimata Sekutu.
3. Sutan Sjahrir dengan latar belakang politik yang steril dari kerjasama dengan Jepang, menjadikannya relatif lebih gampang dalam mengajak Sekutu untuk duduk di meja perundingan. Pada gilirannya, harus diakui bahwa kepemimpinan Sutan Sjahrir dengan garis politik diplomasinya boleh dibilang telah relatif berhasil menggalang simpati dunia dalam sengketa dengan Belanda. Kendati demikian, Sutan Sjahrir acap dinilai gagal dalam menggalang dukungan dari dalam negeri,

---

<sup>41</sup> Ide Anak Agung Gde Agung "*Diplomasi Internasional Bagi Kepentingan Revolusi*", dalam "*Gelora Api Revolusi*", Jakarta: Gramedia, 1988, hlm. 176-177. Peny; Peter Carey dan Colin Wild.

<sup>42</sup> Moedjanto, *op.cit*, hlm. 185.

<sup>43</sup> George M.C Kahin, *op.,cit*, hlm.262.

<sup>44</sup> *ibid*, hlm. 264.

lantaran politik diplomasinya dianggap sering merugikan Republik. Hal ini tercermin dengan menguatnya pihak oposisi selama Ia menjabat sbagai perdana menteri.

#### E. Daftar Pustaka

- (1) Arif Zulkifli, dkk. (2010). *Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta: KPG.
- (2) George MC Kahin (1995). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- (3) J.D. Legge. (1993). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. Jakarta: Grafiti.
- (4) Moedjanto. (1988) *Indonesia Abad 20*, Jakarta: Kanisius.
- (5) Peter Carey& Colin Wild (Peny). (1988). "*Gelora Api Revolusi*". Jakarta: Gramedia.
- (6) Rosihan Anwar (ed). (1980). *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia.
- (7) \_\_\_\_\_ (2010). *Sutan Sjahrir*. Jakarta: Kompas.
- (8) Rudolf Mrazek. (1996). *Sutan Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta: YOI.
- (9) Shoe Hoek Gie. (2005). *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*, Yogyakarta: Bentang.
- (10) Soebadio Sastrosatomo. (1987). *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- (11) Sutan Sjahrir. (1982). *Sosialisme, Indonesia, Pembangunan*. Jakarta, Leppenpas.
- (12) Zulkarnain, (2012). *Jalan Meneguhkan Negara*. Yogyakarta: Pujangga Press.

Penguji

Pembimbing

Dr. Aman, M.Pd  
NIP: 197410152003121001

Zulkarnain, M.Pd  
NIP: 197408092008121001